



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 455648

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.449.255.000

1. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 69.255.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 8.900 m2/120 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.000.000

1. MOBIL, Daihatsu Xenia Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, Honda Vario 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 37.413.064

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.583.668.064

III. HUTANG Rp. 596.139.665

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 987.528.399

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

The screenshot displays the LHKPN e-Filing portal. On the left is a sidebar with navigation links like BERANDA, PANDUAN, and FAQ. The main area features a dashboard with two bar charts comparing data for 2025 and 2024 across categories HTB, HAT, HBL, SB, KAS, and PL. A central modal window titled "Upload Surat Kuasa" provides instructions for uploading electronic documents. It includes a table listing users and their document status, followed by a numbered list of steps for the upload process.

NAMA	STATUS / HUBUNGAN	AKSI
JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA	PIH	Surat Kuasa: Sudah Diterima
YURIKE CORASON SUPARTO, S.KEB	ISTRI	Surat Kuasa: Proses Verifikasi
Hickia Van Joohee Medea	ANAK TANGGUNGAN	Surat Kuasa: Belum Wajib
Arya Abdi Deo Medea	ANAK TANGGUNGAN	Surat Kuasa: Belum Wajib

Tata Cara Upload Surat Kuasa E-Meterai (Meterai Elektronik) :

- Download dokumen Surat Kuasa dengan cara klik .
- Print dan berikan tanda tangan pada dokumen Surat Kuasa tersebut.
- Scan surat kuasa yang telah ditanda tangani, kemudian atur margin setiap sisi 1 cm dan orientasi layout landscape, seperti contoh format .
- Upload scan surat kuasa yang telah ditanda tangani untuk dibubuhkan meterai elektronik melalui laman e-meterai. Pasikan meterai elektronik tidak menimpa specimen tanda tangan.
- Download dokumen yang telah dibubuhkan meterai elektronik dalam format pdf.
- Upload file surat kuasa yang telah dibubuhkan meterai elektronik tersebut dengan cara klik sesuai dengan nama Wajib LHKPN atau Anggota Keluarga. (1 pdf harus berisi 1 dokumen Surat Kuasa dan maksimal berukuran 5 MB per file)